

Mengapa Negara-negara Arab Terkesan Tidak Membantu Palestina Menghadapi Konflik Dengan Israel?

Oleh: Yappi Manafe

Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

Pengantar

Nama “*Palestina*” merujuk pada wilayah di bagian barat daya “*Bilad al-Sham*” (yang meliputi Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon). Palestina merupakan wilayah Arab dan mayoritas Muslim, terletak di pesisir timur Laut Mediterania, di sebelah barat Benua Asia. Secara geografis, Palestina menjadi penghubung antara Benua Asia dan Afrika. Selain itu, letaknya yang berdekatan dengan Eropa serta berada di jantung dunia Arab dan dunia Islam menjadikannya sebagai penghubung antara kedua kawasan tersebut. Posisi geografis ini memberikan Palestina arti penting yang sangat strategis, baik dari perspektif geopolitik maupun geoekonomi.

Secara geografis, Palestina berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di timur laut, Yordania di sebelah timur, dan Mesir di sebelah selatan. Luas wilayah Palestina historis (berdasarkan batas-batas yang dikenal pada masa kini), mencapai sekitar 27.009 kilometer persegi. Wilayah ini memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran pantai, perbukitan, lembah, hingga kawasan gurun, serta menikmati iklim Mediterania yang relatif sedang dan mendukung berbagai aktivitas pertanian maupun permukiman. Palestina merupakan salah satu wilayah yang paling awal dihuni oleh manusia dalam sejarah peradaban dunia. Berbagai temuan arkeologis menunjukkan adanya peninggalan yang berasal dari Zaman Batu Tua (Paleolitikum) sekitar 500.000–14.000 SM, serta Zaman Batu Tengah (Mesolitikum) sekitar 14.000–8.000 SM, yang di Palestina dikenal sebagai Kebudayaan Natufian (“*Natufian Culture*”). Berdasarkan temuan-temuan arkeologi kontemporer, Palestina dipandang sebagai salah satu wilayah pertama di dunia yang mengalami transformasi dari kehidupan manusia yang bersifat nomaden menuju kehidupan menetap dengan berbasis pertanian. Perubahan mendasar tersebut diperkirakan mulai berlangsung sekitar 11.000 tahun yang lalu, atau sekitar 9.000 SM, yang menandai lahirnya salah satu tahap terpenting dalam perkembangan peradaban manusia. Salah satu bukti penting dari perkembangan tersebut adalah berdirinya kota Jericho, yang diperkirakan didirikan sekitar 8.000 SM dan sering disebut sebagai kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga kini.

Sejak masa itu, Jericho terus berkembang sebagai pusat berbagai peradaban yang silih berganti, sehingga menjadikan Palestina sebagai kawasan yang memiliki warisan sejarah dan budaya yang sangat kaya hingga masa modern.

Penduduk Palestina merupakan masyarakat tertua yang diketahui mendiami wilayah Palestina dan meninggalkan jejak peradaban di kawasan tersebut, adalah bangsa Kanaan (*"Canaanites"*). Mereka datang dari Semenanjung Arab sekitar 4.500 tahun yang lalu, sehingga nama pertama yang dikenal untuk wilayah tersebut adalah "Tanah Kanaan" (*"Land of Canaan"*). Masyarakat Palestina masa kini merupakan keturunan bangsa Kanaan, masyarakat pesisir Mediterania Timur, yaitu Filistin (*"Philistines"*), serta berbagai suku Arab yang kemudian melakukan perkawinan dengan kelompok-kelompok tersebut. Meskipun Palestina pernah berada di bawah kekuasaan berbagai bangsa dan pemerintahan sepanjang sejarah, penduduk asli wilayah tersebut, tetap mendiami tanah Palestina secara berkesinambungan. Mayoritas penduduk kemudian memeluk agama Islam, dan sejak kedatangan Islam mereka mengadopsi bahasa Arab sebagai *"lingua franca"* atau bahasa pergaulan utama. Oleh karena itu, identitas Arab dan Islam Palestina telah terbentuk secara berkesinambungan sejak terjadinya Futuh Islamiyah (*"penaklukan Islam"*) pada tahun 15 Hijriah/636 Masehi hingga masa kini. Keberlanjutan tersebut tetap berlangsung meskipun sebagian besar penduduk Palestina mengalami pengusiran secara paksa akibat pendudukan Israel pada tahun 1948.

Palestina di Bawah Pendudukan

Selama masa pendudukan Britania Raya atas Palestina (1918–1948), pemerintah Britania membuka pintu imigrasi bagi masyarakat Yahudi. Akibat kebijakan tersebut, jumlah penduduk Yahudi meningkat secara signifikan, dari sekitar 55.000 jiwa pada tahun 1918 menjadi sekitar 646.000 jiwa pada tahun 1948, atau meningkat dari sekitar 8% menjadi 31,7% dari total populasi Palestina. Pemerintah Britania mendukung proses akuisisi tanah oleh masyarakat Yahudi. Akibatnya, kepemilikan tanah Yahudi meningkat dari sekitar 420.000 dunam (*1 dunam = 1.000 meter persegi*), atau sekitar 1,6% dari luas wilayah Palestina, menjadi sekitar 1,7 juta dunam, atau sekitar 6,3% dari total luas wilayah Palestina. Sebagian besar proses pengalihan kepemilikan tanah tersebut difasilitasi oleh otoritas Britania atau oleh pihak-pihak non-Palestina. Meskipun menghadapi berbagai tekanan, kesulitan, dan penderitaan selama tiga dekade pendudukan, masyarakat Palestina tetap mampu mempertahankan keberadaan mereka di tanah tersebut.

Pada tahun 1948 penduduk Palestina masih merupakan mayoritas, yaitu sekitar 68,3% dari total populasi, serta menguasai sekitar 93,7% dari luas tanah Palestina. Komunitas Yahudi Zionis, dengan bantuan aktif dan perlindungan dari otoritas pendudukan Britania, berhasil membangun berbagai institusi di bidang ekonomi, politik, pendidikan, militer, dan sosial. Hingga tahun 1948, komunitas Yahudi telah mendirikan sekitar 292 permukiman di Palestina. Mereka membentuk kekuatan militer yang berjumlah sekitar 70.000 personel, yang terdiri atas anggota organisasi Haganah, Irgun, dan Stern. Ketiga organisasi tersebut dipersiapkan sebagai bagian dari upaya untuk memproklamasikan berdirinya negara Yahudi.

Resolusi PBB Tahun 1947 tentang Pembagian Wilayah Palestina

Pada 29 November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Resolusi Nomor 181, merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Arab dan satu negara Yahudi. Menurut ketentuan dalam resolusi tersebut, sekitar 54,7% wilayah Palestina dialokasikan untuk negara Yahudi, sekitar 44,8% untuk negara Arab, sedangkan sekitar 0,5% wilayah yang mencakup kawasan Yerusalem ditetapkan sebagai "*corpus separatum*", yaitu wilayah yang berada di bawah rezim internasional khusus. Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada dasarnya bersifat rekomendatif dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Resolusi tersebut tidak memiliki daya ikat yang sama dengan keputusan yang bersifat wajib. Resolusi Nomor 181 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya prinsip mengenai hak setiap bangsa untuk menikmati kebebasan dan menentukan nasib sendiri ("*right to self-determination*"). Rakyat Palestina, sebagai pihak yang paling terdampak oleh rencana pembagian wilayah tersebut, tidak pernah dimintai persetujuan ataupun dikonsultasikan, selain itu, pembagian wilayah tersebut mencerminkan suatu bentuk ketidak-adilan karena memberikan porsi wilayah yang lebih luas serta bagian tanah yang dianggap lebih baik kepada komunitas Yahudi yang pada saat itu digambarkan sebagai kelompok minoritas imigran.

Perang 1948 dan Dampaknya

Pada tanggal 14 Mei 1948, gerakan Zionis memproklamasikan berdirinya negara Israel. Konflik yang kemudian berlangsung berakhir dengan kemenangan pasukan Zionis terhadap gabungan tentara negara-negara Arab.

Kekalahan pihak Arab banyak dikaitkan dengan lemahnya kepemimpinan, buruknya koordinasi antar-pasukan, serta minimnya pengalaman militer. Selain itu, sebagian negara Arab pada saat itu masih berada di bawah pengaruh kekuatan kolonial, yang turut memengaruhi kapasitas politik dan militernya. Hasil dari perang tersebut, pasukan Zionis menguasai sekitar 77% wilayah Palestina atau sekitar 20.770 km², sekitar 800.000 warga Palestina dari total sekitar 925.000 penduduk yang tinggal di wilayah yang kemudian menjadi negara Israel dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Palestina pada tahun 1948 diperkirakan mencapai 1,39 juta jiwa di seluruh wilayah Palestina. Selain perubahan penguasaan wilayah dan perpindahan penduduk secara besar-besaran, perang tahun 1948 juga mengakibatkan penghancuran sebagian besar desa-desa Palestina. Berbagai sumber sejarah mencatat terjadinya puluhan pembantaian terhadap penduduk sipil Palestina selama konflik tersebut. Peristiwa-peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah konflik Palestina–Israel dan memiliki dampak jangka panjang terhadap dinamika politik, demografi, dan kemanusiaan di kawasan tersebut. Kondisi Palestina Pasca-Perang 1948, dari wilayah Palestina yang tersisa setelah Perang 1948, Yordania secara resmi menganeksasi Tepi Barat (*“West Bank”*) yang memiliki luas sekitar 5.876 km², sedangkan Mesir menempatkan Jalur Gaza (*“Gaza Strip”*) seluas sekitar 363 km² di bawah administrasinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima keanggotaan Israel dengan ketentuan bahwa negara tersebut mengizinkan para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan desa mereka, tempat mereka terusir selama konflik, namun hingga saat ini Israel belum melaksanakan tuntutan tersebut.

Perang Juni 1967 dan Dampaknya

Perang yang terjadi pada Juni 1967 mengakibatkan kekalahan besar bagi rezim-rezim Arab. Dalam waktu yang relatif singkat, sisa wilayah Palestina yang sebelumnya belum diduduki juga jatuh ke tangan Israel. Tepi Barat (*“West Bank”*), termasuk Yerusalem Timur, serta Jalur Gaza (*“Gaza Strip”*) berhasil dikuasai Israel. Dalam proses tersebut, sekitar 330.000 warga Palestina kembali mengalami pengungsian atau dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Pada saat yang sama, Israel juga menduduki Dataran Tinggi Golan milik Suriah seluas sekitar 1.150 km² serta Semenanjung Sinai milik Mesir yang memiliki luas sekitar 61.198 km². Dari sisi politik, kekalahan rezim-rezim Arab tersebut mendorong munculnya peran yang lebih dominan dari gerakan perlawanan nasional Palestina, yang kemudian mengambil inisiatif dalam perjuangan politik dan bersenjata.

Sebaliknya, pendekatan nasionalisme Arab yang sebelumnya dipimpin oleh pemerintah-pemerintah negara Arab mengalami kemunduran dan kehilangan pengaruh dalam mengarahkan perjuangan terkait isu Palestina.

Perlawanan Palestina Pasca-Perang 1967

Periode 1967–1970 sering dipandang sebagai masa keemasan gerakan perlawanan Palestina, terutama dalam pelaksanaan operasi-operasi gerilya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok komando Palestina. Namun, sejak 1971, gerakan tersebut tidak lagi dapat menggunakan Yordania sebagai basis atau tempat perlindungan setelah perubahan situasi politik dan keamanan di negara tersebut. Setelah itu, gerakan perlawanan Palestina memusatkan aktivitasnya di Lebanon, meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk melemahkan dan menghilangkan keberadaan organisasi-organisasi perlawanan Palestina, khususnya selama Perang Saudara Lebanon (1975–1990).

Agresi militer Israel yang berkelanjutan terhadap Lebanon, termasuk invasi ke Lebanon Selatan pada tahun 1978 yang diikuti dengan pembentukan zona keamanan (“*security zone*”), serta invasi yang lebih luas pada tahun 1982 hingga mencapai bagian selatan, tengah, dan ibu kota Beirut, mengakibatkan hancurnya infrastruktur Organisasi Pembebasan Palestina (“*Palestine Liberation Organization/PLO*”). Kondisi tersebut memaksa PLO beserta para pejuangnya menarik diri dari Lebanon, mengakibatkan tidak adanya lagi wilayah perbatasan negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel yang dapat digunakan sebagai basis utama bagi gerakan perlawanan Palestina. Hal ini secara signifikan membatasi ruang gerak operasional dan strategi perjuangan organisasi-organisasi perlawanan Palestina pada periode berikutnya.

Kemunduran Dukungan Resmi Negara-Negara Arab Terhadap Palestina

Secara umum, gerakan perjuangan Palestina mengalami sejumlah kemunduran yang signifikan, tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal dari Israel, tetapi juga oleh dinamika politik dengan negara-negara Arab. Sebagian rezim Arab berupaya mengendalikan gerakan Palestina, berbicara atas nama rakyat Palestina, serta mengarahkan perjuangannya sesuai dengan kepentingan politik masing-masing. Setelah Perang Oktober 1973 (Perang Yom Kippur) antara koalisi negara-negara Arab melawan Israel—yang dinilai memberikan keuntungan moral bagi Mesir dan Suriah—serta pengakuan pada tahun 1974 terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (“*Palestine Liberation Organization/PLO*”) sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina, tanggung jawab kolektif negara-negara Arab

terhadap perjuangan Palestina mulai mengalami penurunan. Situasi tersebut semakin menguat setelah Mesir menanda-tangani Perjanjian Camp David pada September 1978, yang dalam praktiknya mengakhiri keterlibatan langsung negara tersebut dalam konflik Arab–Israel. Sebagai negara Arab dengan kekuatan militer terbesar pada saat itu, perubahan kebijakan Mesir membawa dampak besar terhadap dinamika konflik di kawasan.

Selanjutnya, Perang Iran–Irak (1980–1988) serta penurunan harga minyak dunia pada dekade 1980-an menyebabkan berkurangnya dukungan finansial dari negara-negara Teluk kepada gerakan perjuangan Palestina. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990, serta meningkatnya fragmentasi politik di antara negara-negara Arab dan dunia Islam. Selain itu, memburuknya hubungan antara negara-negara Teluk dan PLO turut memperlemah posisi organisasi tersebut. Di tingkat internasional, runtuhnya Uni Soviet beserta Blok Timur juga mengurangi dukungan politik dan strategis yang sebelumnya diterima oleh gerakan perjuangan Palestina. Perkembangan tersebut mendorong kepemimpinan PLO untuk beralih dari strategi perjuangan bersenjata menuju penyelesaian persoalan Palestina melalui proses perdamaian. Sejak saat itu, aktivitas PLO lebih banyak difokuskan pada jalur politik dan diplomasi yang dianggap realistis dalam kondisi yang ada.

Persaingan Politik antara Pendukung Jalur Perundingan dan Jalur Perlawanan

Kemenangan Hamas dalam pemilihan Dewan Legislatif Palestina (*“Palestinian Legislative Council/PLC”*) pada awal 2006 dipandang sebagai indikator meningkatnya kepercayaan sebagian masyarakat Palestina terhadap gerakan Islam dan strategi perlawanan. Hasil pemilu tersebut juga menunjukkan menurunnya dukungan terhadap proses perdamaian dan terhadap kepemimpinan Palestina yang mengadopsi pendekatan negosiasi dengan Israel. Berbagai upaya dilakukan oleh Israel, sebagian kepemimpinan Palestina, sejumlah negara Arab, serta aktor-aktor internasional untuk menggagalkan pemerintahan yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh (dibunuh oleh Israel pada tanggal 31 Juli 2024 di Teheran, Iran) merupakan bukti adanya penolakan terhadap gerakan Islam dan kelompok-kelompok perlawanan. Pada Juni 2007, konflik politik antara Otoritas *Palestina* (*“Palestinian Authority/PA”*) dan Hamas berkembang menjadi konfrontasi bersenjata yang berujung pada pengambil-alihan kendali Jalur Gaza oleh Hamas. Sementara itu, kepemimpinan Otoritas Palestina yang didominasi oleh Fatah mempertahankan kendali atas Tepi Barat (*“West Bank”*) serta tetap berkomitmen pada jalur penyelesaian damai melalui perundingan.

Pemerintah di Tepi Barat juga berupaya membatasi aktivitas kelompok-kelompok perlawanan. Perkembangan tersebut mengakibatkan semakin dalamnya perpecahan politik di kalangan Palestina. Dominasi Fatah terhadap institusi-institusi resmi Palestina menjadi salah satu faktor yang memperburuk perpecahan politik internal. Berbagai upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas telah dilakukan melalui sejumlah Perjanjian, termasuk Perjanjian Rekonsiliasi Mei 2011 beserta kesepakatan-kesepakatan lanjutan, namun berbagai upaya tersebut belum berhasil mengakhiri perpecahan. Kegagalan tersebut dikaitkan dengan perbedaan mendasar mengenai pilihan antara strategi perundingan dan strategi perlawanan, perbedaan pandangan mengenai prinsip-prinsip dasar perjuangan Palestina, prioritas agenda nasional, krisis kepercayaan antara Fatah dan Hamas, serta pengaruh dan intervensi pihak-pihak eksternal.

Hubungan Negara-negara Arab dengan Palestina: Latar Belakang Historis dan Politik

Meskipun negara-negara Arab secara resmi terus menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina, tetapi dinamika keamanan, persaingan geopolitik, serta ketegangan sektarian telah memengaruhi hubungan mereka dengan komunitas Palestina yang tersebar di berbagai negara Timur Tengah. Faktor-faktor tersebut telah memicu berbagai krisis politik, militer, dan kemanusiaan selama beberapa dekade.

Yordania: merupakan salah satu negara yang menerima jumlah pengungsi Palestina terbesar setelah sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka pada saat berdirinya Negara Israel tahun 1948. Setelah Israel memenangkan Perang Arab-Israel tahun 1967, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh Yasser Arafat memindahkan markasnya ke Yordania. Dari wilayah tersebut, PLO meluncurkan berbagai serangan lintas batas terhadap Israel, sekaligus semakin menantang otoritas Raja Hussein. Pada tahun 1970, Raja Hussein selamat dari upaya pembunuhan ketika iring-iringan kendaraannya ditembaki kelompok bersenjata. Pemerintah kemudian meluncurkan operasi militer yang berkembang menjadi perang saudara, yang dikenal sebagai Black September (September Hitam). Konflik tersebut menewaskan ribuan orang dan berakhir dengan pengusiran PLO ke Beirut, Lebanon. Pada tahun 1994, Yordania menjadi negara Arab kedua setelah Mesir yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan secara resmi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Lebanon: Perpindahan PLO dari Yordania ke Lebanon menjadi salah satu faktor yang memperumit situasi politik negara tersebut. Pada tahun 1975, Lebanon yang memiliki struktur masyarakat sangat majemuk berdasarkan identitas agama dan sekte mengalami perang saudara yang berlangsung selama 15 tahun. Kamp-kamp pengungsi Palestina menjadi sasaran berbagai operasi militer oleh Israel, Suriah, maupun milisi-milisi Lebanon yang saling berebut pengaruh dan kendali atas wilayah negara tersebut. Salah satu tragedi paling kelam terjadi pada tahun 1982 ketika milisi Kristen Lebanon, dengan dukungan militer Israel, melakukan pembantaian terhadap sedikitnya 800 warga sipil Palestina di kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Meskipun pemerintah Lebanon secara resmi mendukung hak-hak rakyat Palestina, berbagai organisasi hak asasi manusia mengkritik kebijakan negara yang masih membatasi hak-hak sipil pengungsi Palestina, termasuk akses terhadap pekerjaan dan kepemilikan properti. Pemerintah Lebanon berpendapat bahwa pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah permukiman permanen warga Palestina sehingga tetap mempertahankan hak mereka untuk kembali ke tanah airnya.

Mesir: Sebagai negara Arab dengan jumlah penduduk terbesar, Mesir sejak lama memposisikan diri sebagai salah satu pendukung utama perjuangan Palestina. Mesir berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik antara Israel dan Hamas, termasuk perang Gaza yang dimulai pada tahun 2023, sebagaimana juga dilakukan dalam berbagai konflik dan proses perdamaian sebelumnya. Pemerintah Mesir memiliki hubungan komunikasi dengan berbagai faksi Palestina, termasuk Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007. Namun demikian, Hamas merupakan cabang dari Ikhwanul Muslimin (“*Muslim Brotherhood*”), organisasi Islam politik yang ditindak keras oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi setelah menggulingkan Presiden Mohamed Morsi pada tahun 2013. Prioritas utama Mesir adalah menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan antara Gaza dan Semenanjung Sinai yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman pemberontakan bersenjata. Oleh karena itu, Mesir turut bekerja sama dengan Israel dalam penerapan blokade terhadap Jalur Gaza setelah Hamas mengambil alih kekuasaan. Mesir juga menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Sejumlah warga Palestina yang tinggal di Mesir menyatakan bahwa sejak periode tersebut mereka menghadapi prosedur birokrasi dan pengawasan keamanan yang semakin ketat.

Uni Emirat Arab: Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Arab paling menonjol yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam kurun waktu tiga dekade melalui Abraham Accords yang dimediasi Amerika Serikat pada tahun 2020.

Kesepakatan tersebut mengakhiri kebijakan lama negara-negara Arab yang pada umumnya menolak normalisasi hubungan dengan Israel sebelum terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Pemerintah Abu Dhabi juga dikenal sebagai salah satu penentang utama kelompok-kelompok Islam politik di kawasan, termasuk yang beroperasi di Mesir, Sudan, dan Libya. Sejak normalisasi hubungan tersebut, Israel dan UEA telah membangun kerja sama yang erat di bidang ekonomi, investasi, teknologi, keamanan, dan pertahanan.

Sudan: Selama bertahun-tahun, Khartoum dikenal sebagai lokasi disahkannya resolusi Liga Arab tahun 1967 yang terkenal dengan prinsip "*Three No's*", yaitu tidak mengakui Israel, tidak berdamai dengan Israel, dan tidak melakukan perundingan dengan Israel. Namun, pada Oktober 2020 Sudan menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel. Keputusan tersebut didorong oleh harapan memperoleh bantuan ekonomi, penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme Amerika Serikat, serta integrasi yang lebih luas ke dalam perekonomian internasional. Sebagai imbalannya, pemerintahan Presiden Donald Trump menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme, yang sebelumnya menyebabkan negara tersebut mengalami isolasi ekonomi internasional. Proses normalisasi terutama didorong oleh kalangan militer Sudan.

Kuwait: Hubungan antara Kuwait dan PLO memburuk setelah Yasser Arafat dianggap memberikan dukungan politik kepada Presiden Irak Saddam Hussein (pada masa itu) ketika Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Sebelumnya, Kuwait merupakan salah satu pendukung politik dan penyandang dana penting bagi Arafat. Bahkan, gerakan Fatah didirikan oleh Arafat saat bekerja di Kuwait pada tahun 1964. Setelah perang yang dipimpin Amerika Serikat berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait, ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan Kuwait atau diusir karena banyak warga Kuwait menganggap mereka tidak setia kepada negara tersebut.

Irak: Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, warga Palestina di Irak memperoleh berbagai fasilitas yang jarang diberikan kepada warga negara asing, termasuk subsidi perumahan, pendidikan gratis, serta hak untuk bekerja. Namun, setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, situasi berubah secara drastis. Banyak warga Palestina mengalami diskriminasi, kekerasan, penganiayaan, hingga pengusiran oleh milisi-milisi Syiah yang memperoleh pengaruh politik setelah berakhirnya dominasi pemerintahan Sunni.

Dukungan Negara-negara Arab Terhadap Palestina

Pertanyaan yang sering muncul, tetapi jawabannya tidak sesederhana: "*mengapa negara-negara Arab tidak membantu Palestina?*" Faktanya, negara-negara Arab memberikan bantuan dalam bentuk yang berbeda-beda, namun sebagian besar menghindari keterlibatan militer langsung dengan Israel. Ada beberapa alasan utama:

1. Kepentingan nasional lebih diutamakan: Setiap negara Arab memiliki kepentingan keamanan, ekonomi, dan politik sendiri. Meskipun banyak pemerintah Arab secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina, mereka juga harus mempertimbangkan stabilitas dalam negeri; hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat; investasi dan perdagangan internasional; serta ancaman dari konflik regional lainnya. Akibatnya, banyak negara Arab memilih dukungan diplomatik dan kemanusiaan daripada konfrontasi militer.
2. Keseimbangan kekuatan militer: Israel memiliki salah satu kekuatan militer paling modern di kawasan, didukung oleh teknologi canggih dan memiliki hubungan pertahanan yang sangat erat dengan Amerika Serikat. Banyak negara Arab menilai bahwa perang terbuka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar tanpa jaminan keberhasilan. Pengalaman perang Arab-Israel pada 1948, 1967, dan 1973 juga memengaruhi perhitungan strategis mereka (negara-negara Arab).
3. Perbedaan kepentingan antar-negara Arab: Negara-negara Arab bukanlah satu Blok yang sepenuhnya bersatu. Mereka memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda. Sebagai contoh: Mesir fokus pada stabilitas perbatasannya dengan Gaza dan sering menjadi mediator; Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap Palestina; Yordania memiliki kepentingan khusus terkait warga Palestina yang tinggal di negaranya dan status tempat-tempat suci di Yerusalem. Perbedaan ini membuat sulit terbentuknya kebijakan bersama yang lebih tegas.
4. Perpecahan politik Palestina: Hubungan antara Fatah yang memimpin Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Hamas yang menguasai Gaza, telah lama mengalami ketegangan.

Sebagian negara Arab mendukung satu pihak, sebagian lain mengambil jarak dari Hamas karena alasan keamanan atau politik. Perpecahan internal ini juga menyulitkan pembentukan strategi regional yang seragam.

5. Normalisasi hubungan dengan Israel: Beberapa negara Arab telah menormalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan diplomatik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berharap kerja sama ekonomi, teknologi, dan keamanan dapat memberikan manfaat bagi negaranya. Namun, bahkan negara-negara yang menjalin hubungan dengan Israel tetap menyatakan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina dan sering mengkritik tindakan yang mereka anggap melanggar hukum internasional.
6. Bantuan memang diberikan: Meskipun tidak mengirim pasukan, sejumlah negara Arab memberikan bantuan kemanusiaan (makanan, obat-obatan, rumah sakit lapangan); bantuan keuangan kepada warga Palestina; dukungan diplomatik di forum internasional seperti PBB; serta upaya mediasi untuk gencatan senjata. Misalnya, Qatar selama bertahun-tahun menjadi salah satu penyumbang dana bagi Gaza, sementara Mesir sering berperan dalam negosiasi gencatan senjata dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
7. Risiko eskalasi regional: Keterlibatan militer langsung oleh negara Arab dapat meningkatkan risiko konflik menjadi perang regional yang lebih luas, yang berpotensi melibatkan negara-negara lain dan menyebabkan dampak ekonomi maupun kemanusiaan yang jauh lebih besar. Banyak pemerintah berupaya menghindari skenario tersebut.

Beberapa faktor berikut menjelaskan mengapa negara-negara Arab mengambil pendekatan yang relatif berhati-hati.

1. Stabilitas rezim merupakan prioritas utama: Banyak pemerintah Arab memandang mobilisasi massa terkait Palestina sebagai potensi pemicu demonstrasi yang lebih luas mengenai kesulitan ekonomi, korupsi, maupun tuntutan terhadap kebebasan politik. Oleh karena itu, para pemimpin negara sering membatasi demonstrasi atau mengendalikan retorika publik agar tidak memperkuat kelompok-kelompok oposisi.
2. Kepentingan keamanan dan strategi regional: Negara-negara seperti Mesir, Yordania, monarki-monarki Teluk, dan beberapa negara Arab lainnya memiliki hubungan keamanan dengan Amerika Serikat serta berbagai bentuk kerja sama dengan Israel.

Hubungan tersebut mencakup bantuan militer, kerja sama intelijen, perdagangan, dan koordinasi keamanan regional, khususnya terkait Iran dan kelompok-kelompok bersenjata. Dalam menentukan kebijakan terhadap Gaza, pemerintah negara-negara tersebut harus menyeimbangkan kepentingan strategis tersebut dengan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina.

3. Pertimbangan ekonomi: Banyak negara Arab bergantung pada investasi asing, sektor pariwisata, stabilitas pasar energi, maupun kemitraan strategis dengan negara-negara Barat. Mereka memperhitungkan bahwa sikap yang terlalu konfrontatif dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang merugikan.

Kesimpulan

Alasan utama mengapa sebagian besar negara Arab tidak terlibat langsung secara militer bukan karena mereka sepenuhnya mengabaikan Palestina, melainkan karena kombinasi faktor: kepentingan nasional; pertimbangan keseimbangan militer; perbedaan politik antar-negara Arab; melemahnya identitas pan-Arab dan solidaritas Islam; kepentingan ekonomi yang erat dengan Barat; dinamika politik internal Palestina; hubungan internasional; kekhawatiran akan meluasnya konflik. Oleh karena itu, bentuk dukungan yang lebih umum adalah bantuan kemanusiaan, diplomasi, dan mediasi, sementara keterlibatan militer langsung sejauh ini dihindari oleh sebagian besar pemerintah Arab.

Sikap pasif negara-negara Arab kemungkinan bukan semata-mata merupakan pilihan politik yang disengaja, melainkan konsekuensi dari akumulasi berbagai keputusan politik yang kurang tepat yang diambil oleh para pemimpin Arab beserta para pendukung eksternal mereka di waktu lalu. Oleh karena itu, hanya melalui perubahan kebijakan dan pilihan politik yang lebih baik di masa mendatang sikap pasif tersebut dapat diatasi, sehingga perubahan yang diharapkan oleh masyarakat Arab dapat diwujudkan.

Simpati masyarakat Arab terhadap rakyat Palestina pada umumnya tetap sangat kuat. Berbagai survei, penggalangan bantuan kemanusiaan, dan aktivitas di media sosial menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Palestina masih sangat besar, meskipun aksi demonstrasi di sejumlah negara dibatasi oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakatnya.

Konflik yang berkepanjangan dapat melemahkan pemerintahan apabila masyarakat semakin memandang para pemimpinnya tidak mampu atau tidak cukup berbuat untuk membantu Palestina. Hal tersebut dapat tercermin dalam menurunnya legitimasi pemerintah, meningkatnya tekanan politik, atau munculnya kembali gelombang protes. Namun, apakah hal itu benar-benar akan terjadi bergantung pada banyak faktor, termasuk perkembangan konflik, kondisi ekonomi domestik, dan sistem politik masing-masing negara.

Dunia Arab bukan merupakan entitas politik yang sepenuhnya bersatu. Setiap negara memiliki perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, Iran, peran kelompok Islam seperti Hamas, serta berbagai prioritas geopolitik lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut menyulitkan terbentuknya tindakan kolektif yang terkoordinasi.

Jakarta, 31 Juli 2026

Referensi:

1. Basic Fact On Palestine Issues: An Islamic Perspective, Prof. Mohsen Mohammad Saleh, Al-Zaytouna Centre, Beirut-Lebanon, 2021
2. Why Arabs Do Not Support Palestine, Prof. Muhittin Ataman, Ankara University, May 2024
3. Arab States Are Giving Palestinians The Cold Shoulder: Here Is Why, POLITICO, Michael Hirsh, February 2024
4. Why Arabs Leaders Aren't Helping The Palestinians in Gaza, Responsible Statecraft, Georgio Cafiero, May 20, 2024
5. Arab States and The Palestinians: An Uneasy Relationship, Reuters, Michael Gregory and Jana Chonkeirs, April 7, 2025
6. Why Arab Rulers Aren't More Vocal About Gaza as Global Outcry Grows, NBC News, Mo Abbas and Daniele Hamamdjian, August 14, 2025
7. Arab State Fatigue With The Palestinian Cause, Middle East Forum, Aaron J. Shuster, January 9, 2026
8. Arab States Have Supported and Shunned HAMAS in The Gaza War, Arab Center Washington DC, Rammi G. Khouri, Juli 22, 2026

